



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini
Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan

- Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc*.

2. Terkelola

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

3. Terstandar-disasi

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.

4. Terintegrasi dan Terukur

- Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.

5. Optimum

- Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

- Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

- Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

- Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

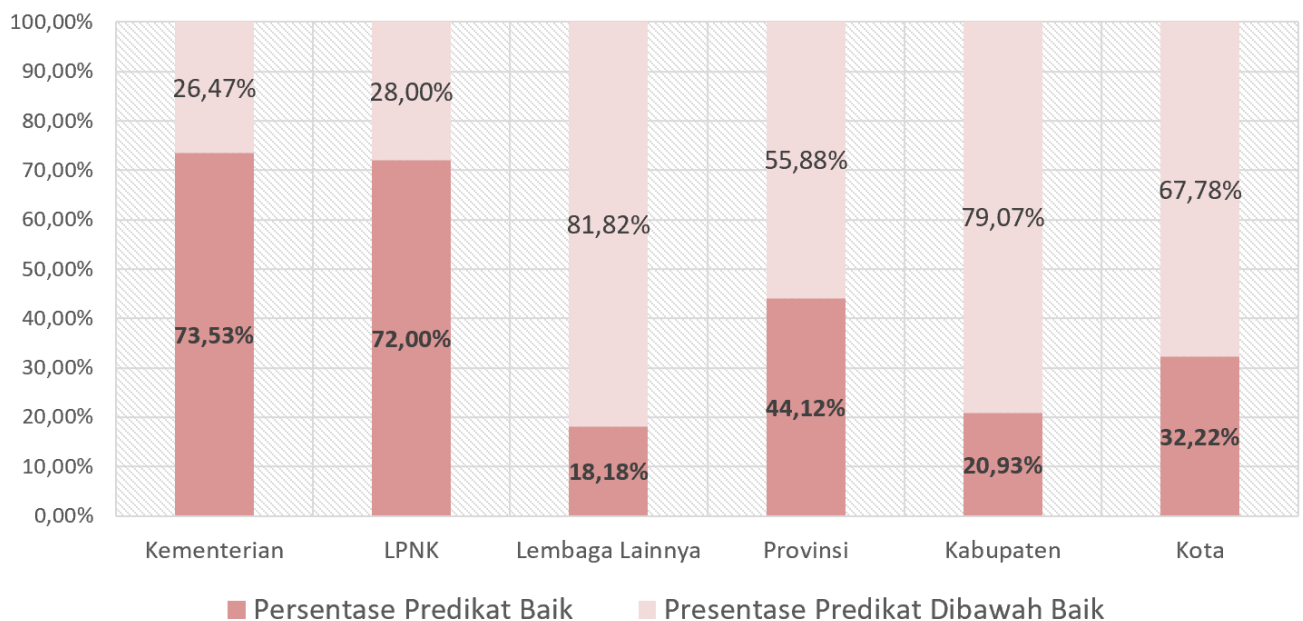
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

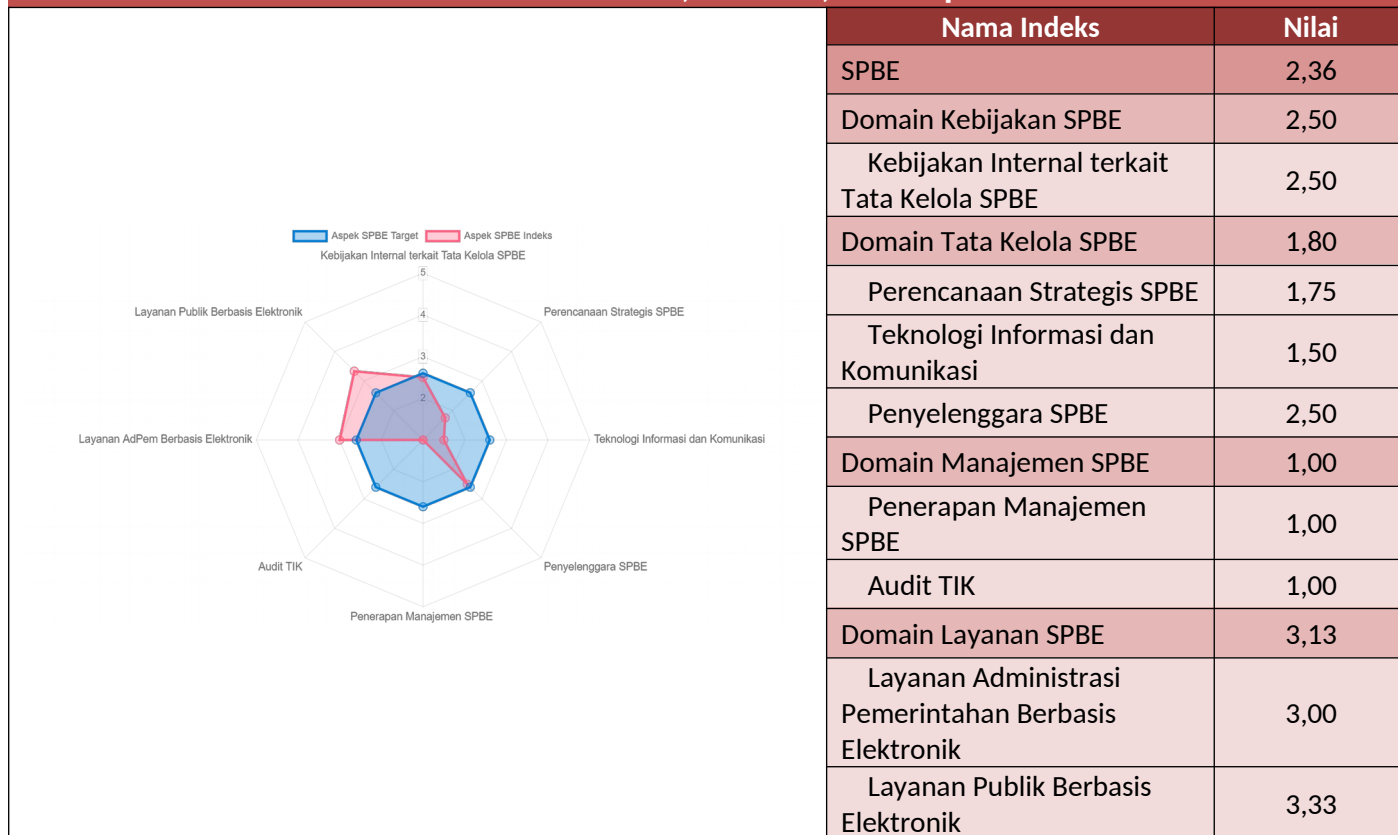
Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Distribusi Nilai Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kapuas adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

- **Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kapuas Hulu.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Kab Kapuas Hulu masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pembangunan aplikasi, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek perencanaan strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kab Kapuas Hulu adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE

- **Kekuatan**

Pada Aspek perencanaan strategis ini Kab Kapuas Hulu belum terlihat memiliki kekuatan.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki dokumen rencana dan anggaran, dan inovasi proses bisnis

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dipenuhi oleh

kapuas hulu adalah dengan adanya pembangunan aplikasi, dan layanan pusat data

- Kekuatan
Pada Aspek teknologi informasi dan komunikasi kapuas hulu belum menunjukkan adanya kematangan yang kuat
- Kelemahan
Namun disisi lain, kapuas hulu masih belum memiliki penerapan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh kapuas hulu adalah dengan bukti tim koordinasi spbe dan kolaborasi penerapan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek penyelenggara SPBE ini kapuas hulu belum menunjukkan kekuatan
- Kelemahan
Namun disisi lain, kapuas hulu masih belum kolaborasi penerapan SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek penerapan manajemen yang sudah dipenuhi oleh kapuas hulu adalah dengan adanya penerapan manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia dan manajemen layanan SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek penerapan manajemen SPBE di kapuas hulu belum menunjukkan adanya kekuatan
- Kelemahan
Namun disisi lain, kapuas hulu masih belum dapat menunjukkan penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset tik, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan spbe

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum ada yang dipenuhi oleh Kapuas Hulu

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK, Kapuas Hulu belum memiliki kekuatan
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki kematangan dalam audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kapuas Hulu adalah dengan adanya layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, pengawasan internal, akuntabilitas kinerja dan kinerja pegawai

- Kekuatan
Kapas Hulu, ada Aspek Administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini dapat terlihat adanya layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kapuas Hulu.
- Kelemahan
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki layanan kearsipan dan layanan pengelolaan barang milik negara dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek layanan publik berbasis elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kapuas Hulu adalah dengan adanya layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan publik sektor 1, sektor 2 dan sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek layanan publik berbasis elektronik ini dapat terlihat layanan data terbuka, layanan JDIH dan layanan publik sektor 2 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kapuas Hulu

- Kelemahan
Namun disisi lain, Kapuas Hulu masih belum memiliki layanan pengaduan publik yang matang

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada seluruh Instansi. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan, sudah dapat menggambarkan predikat Cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki adalah pada kesediaan dalam mengikuti Penilaian dengan sebaik mungkin dan hadir secara kolaboratif dalam pelaksanaan evaluasi SPBE 2021. Penerapan SPBE baik Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan Administrasi Pemerintahan sudah menerapkan pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan/penganggaran, dan kearsipan sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Begitu juga dengan penerapan Aspek Layanan Publik, secara umum aplikasi publik sudah terintegrasi dengan layanan publik lainnya seperti aplikasi Pengaduan publik (SPAN LAPOR) serta aplikasi pengadaan (SPSE). Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Kebijakan Internal terkait Tata Kelola, Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Penerapan TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen TIK dan Aspek Audit TIK. Hal tersebut mungkin terjadi karena dari tahun dimulai diterapkannya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ini masih belum terdapat kebijakan atau peraturan turunan yang mengatur penerapan SPBE di Internal. Sehingga arah dan kebijakan strategis, taktis dan operasional Penerapan SPBE masih belum tersusun dan terkelola dengan baik.

Peran Tim Koordinasi SPBE sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di internal Instansi. Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali ke masing-masing OPD, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE di masing-masing instansi tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfo saja. Dokumen kebijakan SPBE merupakan pedoman utama dalam penerapan SPBE. Berawal dari Kebijakan SPBE maka dapat selanjutnya untuk menyusun arsitektur SPBE dengan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB. Setelah menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai dengan pedoman Nasional maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan penerapan SPBE melalui Peta Rencana SPBE. Peta Rencana SPBE disusun secara lengkap tanpa terkecuali serta mengikuti alur Arsitektur yang diharapkan. setelah seluruh kegiatan terencana maka mulai dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut dan dapat dimonitoring output dari setiap perencanaan dari Peta Rencana SPBE tersebut.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3